

**SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PENGEMBALIAN UANG
SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI *GAMPONG LABUY*
KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan oleh

AFRIZAL

NIM. 441006150

**Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2016 M/ 1437 H**

SKRIPSI

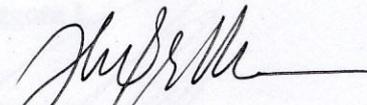
**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh

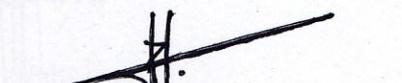
**AFRIZAL
NIM. 441006150**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,


**Julianto Saleh, S. Ag. M. Si
Nip. 197209021997031002**

Pembimbing II,


**T. Zulyadi, S. Sos. I. M. Kesos
Nip. 198307272011011011**

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi Kesejahteraan Sosial
Diajukan Oleh:**

AFRIZAL

NIM. 441006150

Pada Hari/ Tanggal

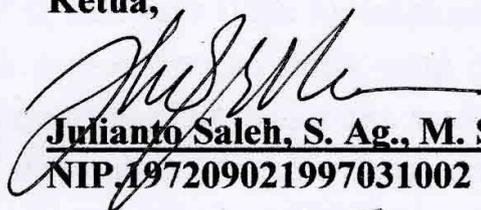
Rabu, 17 Februari 2016 M

8 *Jumadil Awal* 1437 H

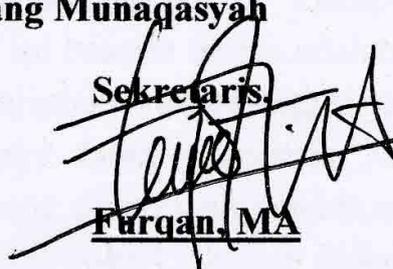
di

**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,


Julianto Saleh, S. Ag., M. Si
NIP. 197209021997031002

Sekretaris,


Furgan, MA

Anggota I,


T. Lembong Misbah, S. Ag., MA
NIP. 197405222006041003

Anggota II,


Nurul Husna, S. Sos. I., M. Si
NIP. 197806122007102002

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**


Dr. A. Rani, M.Si
NIP. 196312311993031035



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



“ Akan kulantunkan zikir tanda sujud syukurku yang teramat dalam atas rahmat yang tercurah atas segala perjuangan meraih cita dan cinta-Mu. Segala puji hanya bagi-Mu yang satu. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya, Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)” (Q.S. An-Najm: 39-40)

Alhamdulillahirabbil 'Alamin... Syukurku Kepada_Mu Ya Rabbi... Akhirnya sebuah perjalanan berhasil ku tempuh walau terkadang aku tersandung dan jatuh. Namun asa yang terpatri tak pernah rapuh meraih cita-cita. Kupersembahkan Do'a tulus buat keluarga tercinta atas segala do'a khusyuk yang diberikannya. Bersama Rahmat dan Ridha_Mu...

IBU

*Terimakasih atas segala pengorbananmu untuk menjagaku
Terimakasih atas bimbinganmu selama ini kepadaku
Terimakasih atas segala kasih sayang yang telah kau berikan kepadaku
Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini. Yang telah bersedia memberikanku pendidikan hingga selesai dan terimakasih atas doa yang selalu kau panjatkan untukku
Terimakasih ibu.*

AYAH

*Tiada balas kasih sayang dan cinta yang kau berikan kepadaku
Terimakasih atas cinta dan pengorbananmu untukku*

Kupersembahkan karya kecil ini kepada ayahanda Razali dan ibunda Rohani yang telah mengiringi langkahku dengan do'a cinta dan kasih sayang, kepada Abang, Kakak dan adikku serta kepada keluarga besarku yang telah memberi dorongan, materi & do'a sehingga membuatku bersemangat dalam menyelesaikan hasil karya ini

Terima kasih kepada teman – teman yang selama ini mendukung ku. Tanpa do'a dan semangat yang kalian berikan tak mungkin aku bisa seperti ini. Sungguh karunia terindah memiliki saudara seperti kalian yang begitu tulus, hari-hari bersama kalian adalah yang terbaik dalam perjalanan hidupku. Semoga Allah S.W.T membalas kebaikan semua. Aamin...

Afrizal



ABSTRAK

Penelitian ini didasari pada adanya simpan pinjam perempuan (SPP) yang merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam dari PNPM Madiri Perdesaan. Uang SPP disalurkan semenjak tahun 2009. Kelompok SPP di Gampong Labuy terbagi dalam dua kelompok, kelompok pertama dengan nama "*Lagee Mupakat*" dan yang ke dua "*Ta Mupakat*", tiap kelompok terdiri dari 8 orang. Kelompok pertama yang mengembalikan dana SPP sesuai dengan peraturan hanya 4 orang, sedangkan kelompok yang ke dua yang mengembalikan uang SPP hanya 5 orang. Setelah penyaluran uang SPP tersebut ternyata menimbulkan persoalan baru yaitu sikap positif dan negatif masyarakat dalam pengembalian uang SPP serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembalian uang tersebut. Sehingga dalam permasalahan ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui sikap positif dan negatif masyarakat, serta kendala-kendala bagi masyarakat dalam mengembalikan uang SPP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan Observasi dan Wawancara yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan data yang dikumpulkan, peneliti berhasil mengungkapkan mengenai sikap positif, negatif dan kendala-kendala bagi masyarakat terhadap pengembalian uang SPP. Jadi, masyarakat yang bersikap positif hanya 7 orang yang mengembalikan dari 16 orang dalam dua kelompok, sedangkan yang bersikap negatif yaitu 9 orang tidak mengembalikan dari 16 orang. Karena masyarakat menganggap bahwa uang tersebut hanya bantuan dari pemerintah yang tidak perlu dikembalikan lagi kepada PNPM. Selain itu masyarakat tidak mengikuti aturan yang berlaku serta penggunaan dana tidak tepat sasaran, memiliki sikap ikut-ikutan untuk tidak mengembalikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pengembalian uang SPP. Hal ini mengakibatkan program SPP di Gampong Labuy terhenti sampai sekarang. Sedangkan kendala dalam pengembalian uang SPP diantaranya: hilangnya rasa tanggung jawab, usaha tidak berjalan, penggunaan dana yang tidak produktif, tidak ada manajemen keuangan yang jelas, kurangnya monitoring program SPP dari pihak lembaga PNPM serta kurangnya pembekalan sebelum menyalurkan dana kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini yang berjudul: **Sikap Masyarakat Terhadap Pengembalian Uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar** sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang diutus untuk menyebarkan Islam di dunia ini. Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dorongan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Di samping itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 1. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orangtua penulis yang tercinta dan terkasih, abang-abang, kakak dan adik penulis yang dengan segala pengorbanannya tidak akan pernah penulis lupakan atas jasa-jasa mereka. Do'a restu, nasihat dan petunjuk dari mereka kiranya merupakan dorongan moril bagi kelanjutan studi penulis hingga saat ini. 2. Bapak Julianto Saleh, S. Ag. M.Si selaku Dosen penasehat Akademik (PA) dan sekaligus sebagai dosen Pembimbing I yang sudah bersusah payah dalam memberi bimbingan skripsi penulis. 3. Bapak T. Zulyadi, M. Kesos selaku dosen Pembimbing II dalam

menyelesaikan tugas akhir. 4. Dr. A. Rani Usman, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. 6. Keluarga besar Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. 7. Sahabat-sahabat di Jurusan PMI-Kesos dan khususnya teman-teman Unit 10 angkatan 2010.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang berlipat dan mudah-mudahan dengan skripsi ini akan menambah semangat untuk meneruskan langkah dalam memperjuangkan cita-cita pendidikan, terlebih sebagai bekal bagi guru dalam proses pembelajaran. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Banda Aceh, 07 Desember

2015

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN | vii |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Penjelasan Istilah Penelitian..... | 11 |
| | |
| BAB II : KAJIAN PUSTAKA | 14 |
| A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan | 14 |
| B. Pengertian, Komponen dan Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Sikap..... | 16 |
| C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat | 19 |
| D. PNPM Mandiri Perdesaan..... | 27 |
| E. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)..... | 32 |
| | |
| BAB III : METODE PENELITIAN | 36 |
| A. Jenis dan Pendekatan penelitian..... | 36 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 37 |
| C. Informan Penelitian..... | 37 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 39 |
| E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data..... | 40 |
| | |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 42 |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 42 |
| B. Sikap Positif Kelompok dalam Pengembalian Uang SPP | 52 |
| C. Sikap Negatif Kelompok dalam Pengembalian Uang SPP | 57 |
| D. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala Bagi Kelompok Terhadap Pengembalian Uang SPP..... | 62 |
| E. Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok SPP | 69 |

| | |
|------------------------------|----|
| BAB V : PENUTUP | 72 |
| A. Kesimpulan. | 72 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| BIODATA PENULIS | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 4.1 Nama-nama Perangkat <i>Gampong Labuy</i> | 42 |
| 4.2 Nama-nama Tuha Peut <i>Gampong Labuy</i> | 43 |
| 4.3 Nama-nama Anggota Kelompok " <i>Lagee Mupakat</i> " | 44 |
| 4.4 Nama-nama Anggota Kelompok " <i>Ta Meupakat</i> " | 45 |
| 4.5 Nama-Nama Anggota Kelompok pertama " <i>lagee Mupakat</i> " yang mengembalikan uang SPP | 57 |
| 4.6 Nama-nama Anggota Kelompok Kedua " <i>Ta Mupakat</i> " Yang menghasilkan Uang SPP | 57 |
| 4.7 Nama-nama Anggota Kelompok Kedua " <i>Lagee Mupakat</i> " Yang tidak menghasilkan Uang SPP | 62 |
| 4.8. Nama-nama Anggota Kelompok Kedua " <i>Ta Mupakat</i> " Yang mengembalikan Uang SPP | 62 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu istilah yang selalu akrab dengan kehidupan manusia. Baik mereka yang benar-benar berada dalam kondisi tersebut yaitu orang-orang yang hidup dalam keadaan miskin ataupun mereka yang terlibat dalam setiap pembicaraan masalah kemiskinan dan aksi melawan kemiskinan.¹

Sebagai fakta sosial, kemiskinan dapat dikatakan sebagai pokok bahasan yang terus bergulir dalam kehidupan. Meskipun demikian, masalah tersebut terus saja menjadi pembicaraan dalam masyarakat dan *up to date*. Terlebih lagi sejak dunia menaruh perhatian serius terhadap masalah kemiskinan. Persoalan kemiskinan tiba-tiba kembali mencuat ke permukaan, baik di media-media massa ataupun dalam forum seminar. Kemiskinan selalu saja menjadi sumber berita dan objek pembahasan yang menarik. Di samping itu juga muncul berbagai bentuk aktifitas sebagai reaksi dari sikap melawan kemiskinan.²

Memang kemiskinan dalam perspektif sosiologis ekonomi merupakan lambing penderitaan umat sebagai suatu yang hina, sehingga di mana dan kapanpun kehadirannya selalu tidak dikehendaki. Kehadirannya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara berarti runtuhnya tatanan dan harga diri bangsa, bahkan

¹ Harsono, *Kemiskinan; Paradigma Berat di Dunia Timur*, (Surabaya: Akademika II, November 2003), hal. 43.

² Harsono, *Kemiskinan; Paradigma....*, hal. 44.

berarti terancamnya ketenangan dan stabilitas nasional. Maka muncullah kemiskinan menjadi masalah besar dan berat yang benar-benar membutuhkan perhatian serius, tidak saja oleh suatu Negara tetapi kemiskinan telah benar-benar menjadi masalah dunia internasional.³

Hal ini menunjukkan bahwa fenomena kemiskinan muncul dengan tidak mengenal batasan dan ruang waktu. Bangsa yang maju sekalipun seperti Amerika Serikat dan Eropa tidak dapat bebas dari masalah kemiskinan. Karena memang pada kenyataannya makmur dan miskinnya suatu bangsa tidaklah semata-mata diukur dengan pendapatan perkapitanya.⁴ Berkaitan dengan hal ini, para ahli sosiologi telah menyusun beberapa indikator tertentu antara lain: kekurangan makanan, perkiraan usia rata-rata ketika dilahirkan dan seberapa luas ketidaktahuannya.⁵

Dari pandangan yang dikemukakan oleh para ahli sosiologi di atas dapat difahami bahwa luasnya kemiskinan ditentukan oleh beberapa petunjuk yaitu kekurangan makanan. Kekurangan makanan yang dimaksudkan di sini ialah ketidakmampuan seseorang di dalam memenuhi kebutuhan pagannya. Selain itu, perkiraan usia rata-rata ketika dilahirkan, mengandung dua pengertian yaitu si ibu yang melahirkan dalam usia yang sangat muda dan anak yang dilahirkan pada masa sebelum waktunya, dan tingkat pengetahuan yang sangat minim. Oleh karena demikian, maka masyarakat akan mengalami dilema gangguan ketentraman yang membawa dampak secara langsung pada pergeseran nilai etika. Etika apabila dilihat

³ Sabil Subhi ath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*, (Bandung: Mizan, 2004), hal. 40.

⁴ Harsono, *Kemiskinan; Paradigma...*, hal. 47.

⁵ Sabil Subhi ath-Thawil, *Kemiskinan...*, hal. 42

dari pengertian bebas mengandung makna bahwa usaha untuk mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah SWT menuju kehadirat-Nya.⁶

Akibat pengaruh kemiskinan tersebut, maka sekelompok masyarakat tertentu akan mengabaikan ketentuan etika yang telah digariskan di atas. Bahkan yang lebih parah lagi, akibat kemiskinan tersebut akan hilangnya rasa baik sangka terhadap Allah SWT merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Baik sangka ialah tidak merasa curiga terhadap Allah dengan apa yang diberikan kepada manusia.⁷

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Gagasan pengembangan masyarakat (*community development*) muncul dalam diskursus keilmuan sebagai sebuah respon terhadap banyaknya masalah yang dihadapi umat manusia pada akhir abad ke-20. Beberapa ahli menyatakan, pengembangan masyarakat merupakan penjelmaan dari sebuah format politik baru pada awal abad ke-20. Pengembangan masyarakat mulai tumbuh sebagai gerakan sosial pada tahun 1970-an menyusul bangkitnya kesadaran progresif dari sebuah

⁶Hamzah Ya'cob, *Etika Suami*, (Bandung: Dipenogoro, 2002), hal. 14.

⁷Kahar Masyhur, *Membina Nilai-Nilai Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 27.

komunitas internasional untuk memberikan perhatian model kesejahteraan distributif secara radikal, memberlakukan model kewarganegaraan aktif dan memberi ruang bagi partisipasi warga dalam proses pembangunan.⁸

Pengembangan masyarakat dalam konteks ini dilaksanakan dengan tujuan pengembangan masyarakat lapisan bawah dalam mengidentifikasi kebutuhan, mendapatkan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan, dan memberdakan mereka secara bersama-sama. Program pengembangan masyarakat pada hakikatnya menjadi aktualisasi komitmen pada aktivitas sosial dalam memecahkan masalah kesenjangan atau ketidakseimbangan antar kelompok masyarakat, termasuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya, kesempatan masyarakat untuk menjauhkan dari penderitaan sosial.

Setiap pengembangan masyarakat didorong untuk pengembangan sumber daya, keterampilan, dan peluang untuk hidup secara lebih baik bagi masyarakat kecil. Program pengembangan dilaksanakan para aktivis sosial dengan menggunakan outreach methods (kegiatan keorganisasian yang bersifat melakukan kontrak, serta memberikan pelayan dan pendampingan kepada anggota masyarakat). Cara ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi warga dalam berbagai kegiatan masyarakat yang berorientasi untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

Kondisi kesejahteraan sosial dewasa ini dibuktikan dengan tingginya angka kemiskinan, angka pengangguran, angka putus sekolah, dan meningkatnya jumlah angka kurang gizi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada bulan Maret 2009, tinggi kemiskinan sebesar 14,15%, dan Indeks Kedalaman

⁸ Madikanto, *Pembangunan Pedesaan Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty dan P3PK UGM 1998), hal. 45-46.

Kemiskinan sebesar 2,50% dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,68% (BPS Hasil Sensus Penduduk 2009). Kondisi ini menunjukkan bahwa warga negara yang mengalami keemiskinan sebesar 14,15%, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia selama ini mengalami distorsi (*distorted development*).⁹

Menurut Midgley seperti dikutip Zubaedi pembangunan yang terdistorsi adalah pembangunan ekonomi yang tidak sejalan dengan atau kurang berdampak pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat secara luas. Atau dengan perkataan lain pembangunan ekonomi yang mengalami distorsi apabila keuntungan dari pembangunan tidak mampu menyentuh dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan menurunkan jumlah angka kemiskina secara bermakna.¹⁰

Program penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dengan melibatkan koordinasi Bank Indonesia melalui program keuangan mikro bersama Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan milik masyarakat seperti Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Program pengentasan kaum miskin yang dilakukan pemerintah secara konseptual telah mengedepankan aspek pemberdayaan, meskipun keberhasilannya belum sesuai harapan.

⁹ Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI, *Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu*, Direktur Bina Gizi Masyarakat Depkes dan Kesos, Jakarta, 2001.

¹⁰ Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif, (Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2007), hal. 15.

Ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi: (1) penyediaan dan perbaikan prasana/sarana lingkungan pemukiman, sosial, ekonomi secara padat karya; (2) Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini; (3) Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs).¹¹

Dana bergulir yang diberikan kepada setiap kelompok perempuan pada PNPM-Mandiri, sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi rumah tangga baik di desa maupun perkotaan (kelurahan). Dana bergulir yang diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat (terutama kaum perempuan) diharapkan dapat digulirkan kembali kepada kelompok lain sehingga perputaran uang semakin cepat dan banyak kaum perempuan yang tersentuh program tersebut. Dalam program PNPM-Mandiri, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di *Gampong Labuy* Kecamatan Baitussalam-Aceh Besar sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Hasil wawancara dengan bapak Iswadi Ishak, SE (Kepala Desa) serta Sekretaris Desa Labuy menjelaskan bahwa program Simpan Pinjam Perempuan

¹¹ Zubaedi, *Wacana Pembangunan...*, hal. 17.

(SPP) di desanya tidak sesuai dengan harapan pemerintah dalam program menanggulangi kemiskinan. Masyarakat berpandangan bahwa dana bergulir yang sudah diterima dari PNPM dalam bentuk modal usaha mereka tidak dikembalikan lagi sesuai dengan perjanjian sebelumnya, mereka menganggap bahwa uang pemerintah jadi tidak perlu dikembalikan, dan mereka tidak merasa bersalah. Sehingga kepala desa labuy dan sekdes mengatakan bahwa, mereka tidak berani lagi membantu masyarakatnya dalam hal pengembangan masyarakat yang bersifat modal usaha, kecuali dana-dana hibah karena sudah banyak pengalaman di desa tersebut program-program seperti itu banyak yang tidak berjalan seperti yang diharapkan.¹²

Berhubungan dengan permasalahan ini, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*¹³

Dalam ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu, karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walaupun krediator tidak memintanya.

¹² Hasil Wawancara dengan Ishak (Keucik Gampong Labuy), Tanggal 12 Agustus 2015

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Mulia, t.t), hal. 48.

Hampir tiap-tiap transaksi yang ada di dunia ini mengenal yang namanya hutang piutang, baik itu transaksi kelembagaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam suatu kelembagaan terdapat macam-macam transaksi yang mana semuanya mengenal istilah hutang piutang didalamnya: perbankan, koperasi, perusahaan, pemerintahan, dan lain-lain. Dengan hadirnya transaksi hutang piutang, terjadi banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk memeras pihak-pihak yang lagi membutuhkan keuangan. Padahal pada hakikatnya suatu transaksi hutang piutang adalah taawun (tolong menolong). Akan tetapi akad tolong menolong tersebut dipelintir menjadi suatu tambahan didalam pelunasan hutang, sampai akhirnya terjadi suatu tambahan tersebut dinamakan riba. Hal tersebut dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik kelembagaan maupun perorangan¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Gampong bahwa uang simpan pinjam perempuan (SPP) disalurkan semenjak tahun 2009 . Kelompok SPP di Gampong Labuy terbagi dalam dua kelompok, tiap kelompok terdiri dari 8 orang, kelompok pertama dengan nama kelompok "*Lagee Mupakat*". Sedangkan yang mengembalikan dana SPP sesuai dengan peraturan hanya sebagian berjumlah 4 orang. Kelompok ke dua "*Ta Mupakat*". Dengan jumlah anggota 8 orang, yang mengembalikan uang SPP hanya 5 orang, itupun tidak sesuai dengan peraturan artinya tidak semuanya dikembalikan sesuai dengan perjanjian.¹⁵ Sehingga dari uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

¹⁴ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz I, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), hal. 156-157.

¹⁵ Hasil Observasi, Tanggal 2-8 Agustus 2015.

Bagaimanakah Sikap Masyarakat Terhadap Pengembalian Uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah masyarakat bersikap positif dalam pengembalian uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar?
2. Apakah masyarakat bersikap negatif dalam pengembalian uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar?
3. Apa saja yang menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengembalikan uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang sikap positif masyarakat dalam pengembalian uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui tentang sikap negatif masyarakat dalam pengembalian uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

3. Untuk mengetahui tentang kendala masyarakat dalam mengembalikan uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak baik dari dalam bidang akademis maupun praktis. Manfaat tersebut dirincikan sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis

Bagi pengembangan keilmuan dengan terungkapnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan maupun bahan rujukan/ pijakan bagi penelitian lain.

2. Manfaat Praktis.

Bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar, khususnya masyarakat di kecamatan Baitussalam, dengan terungkapnya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan koreksi demi mendapat solusi bagaimana seharusnya mengembalikan uang simpan pinjam perempuan (SPP) di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

E. Penjelasan Istilah Penelitian

1. Sikap Masyarakat

Sikap adalah perbuatan yang berdasarkan pada pendirian.¹⁶ Dalam hal ini ahli psikologi juga mengatakan hal yang sama yang ada kemiripannya, bahwa sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak secara teratur.¹⁷

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 838.

Sikap didefinisikan sebagai reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus objek. Disini dapat disimpulkan bahwa mendefinikan sikap itu tidak dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek.¹⁸

Sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu. Dalam berinteraksi sosial, individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya.¹⁹

2. Pengembalian Uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

a. Pengembalian Uang

Menurut chairuman pasaribu pengertian hutang-piutang ini juga sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam-meminjam”, yang dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian denganman pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah ketentuan barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa

¹⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, Cet II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hal. 103.

¹⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar...*, hal. 104.

¹⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 57.

pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam keadaan yang sama pula”.²⁰

b. Simpan pinjam perempuan (SPP)

Simpan pinjam perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam dari PNPM Mandiri. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.²¹

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.²²

²⁰ Chairuman Pasaribu Surahwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. Ke 1, (I Jakarta: Sinar Grafik), 1994, hal. 136

²¹ Tim Pengendali (TP) PNPM, 2007, hal. 19.

²² Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Petunjuk Teknik Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, Jakarta, 2009

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Skripsi adalah media seorang untuk menempuh gelar sarjana jadi bisa dikatakan adalah sarana untuk mendapatkan gelar dalam suatu Akademis. Dalam skripsi seorang mahasiswa harus menemukan suatu permasalahan yang ada di lapangan. Jadi, setiap mahasiswa harus mampu untuk tidak saling sama mengenai judul dan pembahasan yang dibahas. Bahkan untuk skripsi yang terdahulu harus ada perbedaan ataupun perbandingan antara yang satu dengan yang lain.

Penelitian Eti Trisnawati berjudul “Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Petani Pala Melalui Koperasi PNPM” metode yang digunakan *field research* yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dikembangkan oleh masyarakat petani pala menggunakan modal dari koperasi untuk membuat manisan pala dan dijual ke warung-warung kopi untuk meningkatkan perekonomiannya. Tak kalah penting juga partisipasi masyarakat Alue Mas juga memberikan ide di dalam melakukan suatu kegiatan, seperti: tenaga, pikiran dan lain-lainya demi memajukan perekonomian masyarakat. Namun masih adanya kendala yang dialami oleh masyarakat petani dalam meningkatkan perekonomiannya melalui koperasi seperti: longsor, banjir dan badai menghantam, kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri dalam memanfaatkan sumber daya

alam serta kurangnya perhatian pemerintah dari dinas pertanian terhadap masyarakat petani pala dalam meningkatkan perekonomiannya.²¹

Penelitian Zakiah dengan judul “Implementasi Program Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG) Di Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen” menggunakan metode penelitan lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian ini bertujuan; untuk mengetahui implementasi program BKPG di Kecamatan Jangka Kabupaten Bireueun dan mengetahui apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi program BKPG di Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program BKPG di Kecamatan Jangka merujuk pada buku petunjuk umum pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemakmu *Gampong* (BKPG) tahun 2009. Di kecamatan Jangka telah melaksanakan program bangunan fisik berupa rabat betoon dan saluran lingkungan terlaksana dengan baik untuk mencakupi dari prinsip pengelolaan BKPG itu sendiri yaitu bersifat transparan dan akuntabel, masyarakat ikut mengambil keputusan dalam pengelolaan program BKPG ini dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta memberi sumbangan tenaga, pikiran dan materil. Namun yang menjadi kendala dalam program ini keterlambatan penyaluran dana BKPG ke *Gampong* sehingga

²¹ Eti Trisnawati, *Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Petani Pala Melalui Koperasi PNPB*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2015).

menyebabkan terbelanglail program-program yang ingin dilaksanakan pada waktu yang tepat.²²

B. Pengertian, Komponen dan Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Sikap

1. Pengertian sikap

Menurut Harvey dan William P. Smit sikap adalah kesiapan untuk merespon secara konsisten dalam bentuk positif atau negatif terhadap objek atau situasi.²³ Krech beserta Grutchhfield dan Ballachey mendefinisikan sikap sebagai sebuah sistem yang menetap dari penilaian positif atau negatif, perasaan-perasaan emosional dan kecenderungan mendukung atau menolak terhadap suatu objek sosial.²⁴ Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang berupa perilaku nyata, akan tetapi berupa *presdiposisi*, sebuah kecenderungan berperilaku.

Dalam wacana yang bersifat umum, sebagaimana dikutip oleh Fattah Hanurawan dalam buku Baron dan Byrne mengemukakan definisi sikap sebagai penilaian subjektif seseorang terhadap suatu objek. Sama halnya sebagaimana dikutip oleh Fattah Hanurawan dalam buku Strickland menjelaskan bahwa sikap adalah predisposisi atau kecenderungan untuk memberi respon secara kognitif,

²² Zakiah, *Implementasi Program Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG) di Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2013).

²³ Siti Partini Suardiman, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Studing, t.t), hal. 61.

²⁴ Kholili, *Komunikasi Untuk Dakwah*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hal. 66.

emosi, dan perilaku yang diarahkan pada suatu objek, pribadi, dan situasi khusus dalam cara-cara tertentu.²⁵

2. Komponen Sikap

Sikap berupa *prediposisi* tingkah laku yang terdiri dari tiga komponen, antara lain:

- a. Kognitif yaitu keyakinan terhadap suatu objek. Komponen kognitif akan menjawab pertanyaan apa yang dipikirkan atau dipersepsikan tentang objek. Meliputi informasi tentang objek dan keyakinan tentang apa yang mungkin ada atau terjadi pada objek sikap.
- b. Afektif adalah emosi subjektif (perasaan) atau kesukaan orang terhadap objek. Menjawab pertanyaan tentang apa yang dirasakan terhadap objek. Komponen afektif didominasi penilaian positif atau negatif pada objek sikap, suka atau tidak suka.
- c. Konatif yaitu kecenderungan berlaku pada diri seseorang terhadap objek. Komponen konasi akan menjawab pertanyaan bagaimana kesediaan atau kesiapan untuk bertindak terhadap objek. Menunjukkan kecenderungan seseorang untuk bertindak pada objek sikap itu.²⁶

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Sikap

Proses belajar sosial terbentuk dari interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya. Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap

²⁵ Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial, Suatu Pengantar*, Cet Ke 2, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 64.

²⁶ Kholili, *Komunikasi Untuk Dakwah*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hal. 66-68.

adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, dan institute pendidikan diantaranya:

- a. Pengalaman pribadi dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut melibatkan faktor emosional. Dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan akan pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama berbekas.
- b. Kebudayaan adalah sebagaimana dikutip oleh Saifuddin Azwar dalam buku B.F. Skinner menekankan pengaruh lingkungan (termasuk kebudayaan) dalam membentuk kepribadian seseorang. Kepribadian tidak lain daripada pola perilaku yang konsisten yang menggambarkan sejarah reinforcement (penguatan, ganjaran) yang dimiliki.
- c. Orang lain yang dianggap penting, pada umumnya, individu bersikap konformis atau searah dengan sikap orang-orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.
- d. Media massa sebagai sarana komunikasi, berbagai media massa seperti televisi, radio, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang dibawa informasi tersebut,

apabila cukup kuat, akan memberi dasar afektif dalam mempersepsikan dan menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu.

- e. Institusi pendidikan dan agama sebagai suatu sistem, institusi pendidikan dan agama mempunyai pengaruh kuat dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya.
- f. Faktor emosi dalam diri, tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian bersifat sementara dan segera berlalu begitu frustrasi telah hilang akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang lebih persisten dan lebih tahan lama. contohnya bentuk sikap yang didasari oleh faktor emosional adalah prasangka.²⁷

C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto pemberdayaan itu adalah sebuah proses dan tujuan. Disebut sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk

²⁷ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia dan Pengukurannya*, Cet Ke 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 56-59

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun social seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.²⁸

2. Konsep Pemberdayaan

Dilihat dari lapangan ada tiga konsep pemberdayaan antara lain

- a. Pemberdayaan yang hanya berkuat di “daun” dan “ranting” atau pemberdayaan konformis. Karena struktur social, dan struktur ekonomi sudah dianggap *Given*. Maka pemberdayaan adalah usaha bagaimana masyarakat tunadaya harus menyesuaikan dengan yang sudah memberi *Given* tersebut.
- b. Pemberdayaan yang hanya berkuat di “batang” (pemberdayaan reformis), maksudnya secara umum tatanan social, ekonomi, politik dan budaya sudah tidak ada lagi masalah. Konsep ini disebut sebagai *naïve paradigm*.
- c. Pemberdayaan yang hanya berkuat di “akar” atau pemberdayaan struktural.

²⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: Reflika Aditama, 2005), hal. 52.

3. Tahap-tahap Pemberdayaan

Dalam pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara langsung atau tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses tahapan yaitu:

- a. Tahap persiapan
- b. Tahap assessment
- c. Tahap perencanaan alternative program atau kegiatan
- d. Tahap pemformulasikan aksi
- e. Tahap pelaksanaan program
- f. Tahap evaluasi
- g. Tahap terminasi²⁹

4. Strategi dan intervensi pemberdayaan

Strategi pada dasarnya memiliki tiga arah yakni

- a. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat
- b. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat.
- c. Modernisasi³⁰

Istilah pemberdayaan seringkali berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi yaitu dengan meningkatkan kemampuan ekonomi individu yang merupakan pra syarat pemberdayaan. Tetapi lebih dari sekedar hal yang berkaitan dengan ekonomi, pemberdayaan merupakan tindakan usaha perbaikan di segala

²⁹ Projono, O. S dan Pranarka, A. M. W. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS.1996), hal. 269.

³⁰ Sumodiningrat Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 130-133

aspek termasuk hal yang berkaitan dengan sosial, budaya, politik, psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan kelompok sosial.³¹

Masyarakat adalah “sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama”.³² Masyarakat dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan sebagainya. Atau dengan kata lain kebulatan dari semua perhubungan dalam hidup bermasyarakat. Dalam arti sempit masyarakat adalah sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, misalnya teritorial, bangsa, golongan dan sebagainya.

Adapun pengertian kesejahteraan sosial pada dasarnya diciptakan atas kompromi tiga elemen yaitu, pertama sejauh mana masalah sosial diatur, kedua sejauh mana kebutuhan dapat dipenuhi, ketiga sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat dipenuhi.³³ Sedangkan pemberdayaan dari kata “daya” yang mendapat awalan ber menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya berarti memiliki kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan m dan akhiran an

³¹ Sunartiningsih, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), hal. 148.

³² Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. Ke 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 721.

³³ James Midgley, *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Diperta Islam Depag, 2005), hal. 21.

menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari “empowerment” menurut Merriem Webster dalam Roesmidi dan Rizi mengandung dua pengertian. Pertama, *to give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kecakapan atau kemampuan atau memungkinkan untuk. Kedua, *to give power or authority to*, yang berarti memberi kekuasaan. Dari pengertian di atas, maka kata pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau kekuatan serta memberikan kekuasaan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya.³⁴

Dari penjelasan di atas, dapat dirumuskan beberapa definisi pemberdayaan sebagai berikut: pertama, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah dan tidak beruntung. Kedua, pemberdayaan adalah sebuah proses dimana seseorang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan di atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya, pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Ketiga, pemberdayaan menunjuk pada pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Keempat, pemberdayaan

³⁴ Roesmidi dan Riza Lisianti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Algaprint, 2006), hal. 21.

adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa pemberdayaan dapat dilihat sebagian proses dan tujuan. Pemberdayaan menurutnya merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. Sedangkan menurut Roesmidi dan Riza, pemberdayaan diartikan sebagai mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan hari depannya.

Dalam kajian pemberdayaan, pemberdayaan komunitas seringkali menggunakan istilah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.³⁵

Jadi pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk memberikan kekuatan terhadap kelompok lemah dalam masyarakat melalui proses penyadaran agar mampu mengatasi permasalahan yang mereka hadapi sendiri, sehingga mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya. Dalam hal ini pemberdayaan adalah memampukan dan mendirikan masyarakat.

³⁵ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 133.

Dalam kerangka demikian maka pendekatan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan; pertama, menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua, penguatan potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat. Ketiga, pemberdayaan yang juga berarti melindungi.³⁶

Selain ketiga pendekatan tersebut, Edi menambahkan dua pendekatan lagi yaitu melalui penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya, dan pemeliharaan yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Hakikat pemberdayaan pada dasarnya adalah penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat bisa berkembang. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap masyarakat pasti memiliki daya akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau potensi yang ada belum tergalikan untuk dikembangkan. Pemberdayaan tidak menjebak masyarakat dalam perangkap, sehingga pemberdayaan sebaiknya mengantarkan pada proses kemandirian.

Pemberdayaan mempunyai beberapa tahap, antara lain:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar mampu mengambil peran dalam pembangunan.

³⁶ *Ibid.* Hal. 134.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan ketrampilan sehingga berbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantar pada tahap kemandirian.

Proses pemberdayaan masyarakat mendasarkan pada 4 prinsip berikut ini:

- a. Partisipatif, adalah proses pemberdayaan harus dilakukan secara demokratis dengan melibatkan semua stakeholder baik pemerintah, swasta, masyarakat termasuk miskin itu sendiri. Sehingga masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek namun subjek dalam perencanaan pemberdayaan.
- b. Transparansi, adalah adanya keterbukaan di antara stakeholders sehingga setiap tahapan akan direncanakan, mulai dilaksanakan sampai dengan evaluasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Akuntabilitas, adalah perencanaan pemberdayaan nantinya dapat diimplementasikan dan tercapai tujuan serta sasaran.
- d. Manfaat bersama, adalah proses pemberdayaan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada upaya pembangunan masyarakat sebagai kontribusi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Pendekatan pemberdayaan pada intinya adalah berupaya untuk menghapuskan subordinasi perempuan, termasuk di dalamnya adalah hak ekonomi, hak reproduktif dan hak-hak resmi yang tidak diskriminatif. Pendekatan ini dianggap tidak terlalu menyibukkan diri dengan proyek pembangunan tetapi

menemukan perwujudannya dalam beberapa kegiatan gerakan perempuan dunia ketiga.³⁷

Pemberdayaan perempuan di sini lebih kepada bagaimana mengupayakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan agar mempunyai akses dan kesempatan yang seimbang dalam kehidupannya, tidak kemudian pemberdayaan perempuan diartikan sebagai suatu hal yang memenangkan perempuan dari kuasa laki-laki. Seimbang dan setara, kedua hal tersebut itu yang menjadi pokok dalam konsep pemberdayaan perempuan.

D. PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri di canangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 30 April 2007. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang mterdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, dan diantara bentuk pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah melalui pemanfaatan simpan pinjam untuk perempuan. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada dibawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini di dukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan

³⁷ *Ibid.* Hal. 149.

Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan pinjaman dari Bank Dunia.³⁸

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.³⁹

PNPM Mandiri juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. PNPM Mandiri difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui PNPM Mandiri pemerintah melakukan integrasi dan perluasan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat juga memerlukan

³⁸ *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, hal. 1

³⁹ Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*, (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008), hal. 4.

keterlibatan dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberi kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

PNPM penguatan dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Pelaksanaan program-program ini ditingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri.

Beberapa rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya. Untuk mendukung kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku local/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan loka karya, kunjungan lapangan yang dilakukan selektif.

Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen.⁴⁰

Dalam proses perkembangan ini pemerintah berkesempatan menyalurkan dana anggaran pembangunannya juga bagi perbaikan kampung dengan cara memperbaiki prasarana. Faktor pengembangan lingkungan hidup harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun bangunan rumah.⁴¹ Apalagi masyarakat yang kurang mampu harus lebih didekati karena program yang direncanakan pemerintah membangun bagi yang kurang mampu berdasarkan kriteria yang sudah disepakati oleh pemerintah.

Tujuan PNPM Mandiri secara umum adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan PNPM Mandiri secara khusus adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan.
- b) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya local.
- c) Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- d) Menyediakan prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- e) Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- f) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan.

⁴⁰Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008), hal. 17.

⁴¹ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: LP3ES, 2001), hal. 8.

- g) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.⁴²

1. Jenis-jenis dan Strategi dalam Pengelolaan PNPM Mandiri

Adapun jenis kegiatan PNPM Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM.
- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal).
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

Selain jenis PNPM yang diizinkan di atas, ada juga jenis PNPM Mandiri

yang dilarang oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik.
- b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah.
- c. Pembelian *chainsaw*, senjata, bahan peledak, asbestos dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain).
- d. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya.
- e. Pembiayaan gaji pegawai negeri.
- f. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja.
- g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau.
- h. Kegiatan apapun yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada izin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut.
- i. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan terumbu karang.
- j. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju Negara lain.
- k. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai.
- l. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya dari 50 Ha.

⁴² Sumayardi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Penerbit Citra Utama, 2008), hal. 25.

- m. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air kapasitas besar, lebih dari 100 meter kubik.

Pengelolaan PNPM Mandiri diperlukan suatu strategi yang tepat agar tujuannya bisa berhasil dengan baik dan maksimal. Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam mengambil keputusan.
- b. Meningkatkan sinergisitas antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
- c. Memberikan bantuan kepada masyarakat berupa dana bantuan langsung masyarakat dan bantuan pendampingan berupa *technical assistance*.⁴³

E. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Simpan pinjam atau Ariyah adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya. Agar dapat dikembalikan lagi zat barang tersebut.

Program koperasi Simpan Pinjam Khusus Perempuan merupakan salah satu produk program pembangunan PNPM Pedesaan di bidang pembangunan ekonomi. Program tersebut diperuntukkan untuk para wanita yang akan memulai usaha dan atau yang sudah mempunyai usaha. Dalam berjalannya program ini terdapat beberapa pemangku kepentingan atau *stakeholder* yang berperan dalam berjalannya program tersebut, yaitu: pihak aparat desa (Kades, Sekdes, dan Fasilitator Desa), UPK (Unit Pelaksana Kegiatan), TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), monitoring dan juga Anggota KSPP (Kelompok Simpan Pinjam Perempuan) itu sendiri sebagai penerima manfaat.

⁴³ Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, Jakarta: 2010, hal. 20.

Hawe dalam Tanasale, model perencanaan program Simpan Pinjam Khusus Perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Goal: Untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan, usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan sosial pendanaan sosial dasar, memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan, serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.
- b. Objective: Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan kaum rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam kaum perempuan.
- c. Sub Objective: Pengembalian SPP dan pengelolaan dana bergulir.
- d. Strategi Objective: Pendampingan, pendanaan, monitoring, dan evaluasi.⁴⁴

Tujuan khusus kegiatan SPP: (1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha/sosial dasar; (2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha; (3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam kaum perempuan.

Sasaran kegiatan SPP yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha/kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja

⁴⁴ Tanasale SA, *Evaluasi Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) dalam PNPB- Mandiri Perdesaan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hal. 209.

bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

Kriteria kelompok perempuan yang mendapat pinjaman dana yaitu: (1) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, satu sama lain mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun; (2) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpan dan dana pinjaman yang telah disepakati; (3) Mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota; (4) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik; (5) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.⁴⁵

Tahapan seleksi di tingkat desa untuk memilih kelompok SPP: (1) Penentuan usulan desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP; (2) Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa; (3) Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan.

Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam perjanjian pinjaman paling tidak mencakup hal-hal: (1) Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan: besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 210.

lembaga keuangan pada wilayah masing-masing. Sistem perhitungan pinjaman menurun atau tetap; (2) Jangka waktu pinjaman sumber dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maksimal 12 bulan; (3) Jadwal angsuran dana BLM paling langsung dari kelompok ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK).⁴⁶

⁴⁶ Sumodiningrat Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 130.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yakni, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.¹ Dengan melakukan pendekatan kualitatif ini maka peneliti “ melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari satu keutuhan (*entity*).

Penerapan pendekatan kualitatif ini antara lain didasarkan pada pertimbangan dapat membantu peneliti menyesuaikan diri dalam menghadapi kenyataan ganda dilapangan, dapat membantu peneliti berinteraksi dengan subyek penelitian dalam konteks yang dialami, sehingga tidak memunculkan kondisi yang seolah-olah dibuat-buat atau direayasa oleh peneliti ketika peneliti berusaha memahami sikap masyarakat terhadap pengembalian uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang menemukan dan memahami suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat. *field research* adalah tumpuan untuk mempelajari secara intensif tentang

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 104.

latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial yang menyangkut individu, kelompok, lembaga atau kumpulan masyarakat.

Dalam hal ini yang menjadi pusat perhatian dari peneliti adalah mengenai sikap masyarakat terhadap pengembalian uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di *Gampong Labuy* Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian ini, adalah *Gampong Labuy* Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Penulis meneliti *Gampong Labuy* mengenai sikap masyarakat terhadap pengembalian uang Simpan Pinjam (SPP), karena berdasarkan sumber data awal di *Gampong* ini ada dua kelompok SPP yang enggan mengembalikan uang Simpan Pinjam Perempuan dan bahkan ada yang tidak mengembalikannya sama sekali. Oleh karena itu, sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penulis menjadikan *Gampong Labuy* sebagai lokasi penelitian.

C. Informan Penelitian

Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan pada umumnya informan berjumlah kecil tetapi sebanyak mungkin menjangkau informasi untuk tujuan penelitian dan tetap dalam batasan masalah penelitian.

Adapun ciri-ciri *purposive sampling* adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan sampel harus didasari atas ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.²

Penelitian ini mengenai sikap masyarakat khususnya untuk program simpan pinjam perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri melalui Bantuan Pemakmue *Gampong* (BKPG) pada Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh besar ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ketua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 2 (dua) orang
2. Anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 14 (enam belas) orang yang terdiri dari kedua kelompok yaitu kelompok “*Lagee Mupakat*” dan kelompok “*Ta Mupakat*”

Alasan peneliti memilih kriteria di atas karena mereka orang-orang yang terlibat langsung dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di *Gampong Labuy* Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

² S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Praktis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hal. 134.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu Wawancara dan Oservasi,

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara peneliti dengan responden, dan kegiatan dilakukan secara lisan.³

Dalam melakukan wawancara peneliti memiliki pedoman wawancara yang dijawab secara terbuka atau bebas oleh informan. Pedoman wawancara ini berisi pokok-pokok masalah yang ditanyakan di mana pertanyaan tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan keperluan atau situasi yang ada di lapangan. Dalam proses wawancara ini peneliti menggunakan alat perekam saat mewawancarai informan yaitu telepon genggam atau *handphone* (HP).

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap suatu fenomena yang akan dikaji, dimana peneliti terjun secara langsung dalam lingkungan masyarakat yang akan diteliti.⁴ Dalam observasi ini, peneliti mengamati secara langsung masyarakat yang terlibat dalam kelompok simpan pinjam perempuan, baik

³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 39.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 106.

yang bersikap positif yaitu anggota kelompok yang menjelaskan bahwa mereka ada mengembaikan uang tersebut sesuai dengan peraturan dari PNPM Mandiri Perdesaan dan juga anggota kelompok yang tidak mengembalikan uang SPP, serta melihat usaha-usaha yang mereka jalankan sesuai dengan harapan dalam program SPP.

Dalam tahap ini, peneliti juga mengamati faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi masyarakat dalam menjalankan program uang simpan pinjam perempuan di *Gampong Labuy* Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data yang relevan dengan penelitian.⁵ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan segala jenis data atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan diperlukan bagi penulis yang terkait dengan Uang SPP yang ada di *Gampong Labuy* Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data ini merupakan salah satu tahapan penting proses penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan (*Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif*). Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variable-

⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek...*, hal. 41.

variabel yang ada, penelitian ini dilakukan dari deduktif ke induktif atau dari umum ke khusus.⁶ Setelah data sudah terkumpul diolah dan pengolahan data tersebut menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data tentang sikap masyarakat terhadap pengembalian uang SPP sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan diverifikasi, dengan kata lain reduksi data merupakan proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transpormasi yang didapatkan dari catatan tertulis di lapangan melalui observasi dan wawancara.
2. Penyajian data yaitu dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau narasi dan berbentuk tabel.
3. Menarik kesimpulan, data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan.⁷

⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet 12, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 26.

⁷ Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 256.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Nama-nama Perangkat *Gampong* Labuy

Adapun Nama-nama Perangkat *Gampong* Labuy seperti dalam Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Nama-nama perangkat *Gampong* Labuy

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Iswadi Ishak, SE | Keuchik |
| 2 | Syarifuddin, A. Md | Sekgam |
| 3 | Eri Alfian | Bendahara |
| 4 | Tgk. Ibrahim Abbas | Imam Meunasah |
| 5 | Hanafiah | Ketua Pemuda |
| 6 | Iswadi Ishak | Kaur Pemerintahan |
| 7 | Hanafiah | Kaur Pembangunan |
| 8 | Anwar HSB | Kaur Kesra |
| 9 | Zainuddin | Kepala Dusun Lancang |
| 10 | Marwan ABD | Kepala Dusun Panglima Dalam |
| 11 | Mahdi | Kepala Dusun Tgk BakKupula |

Sumber : Buku Induk *Gampong* Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

2. Nama-nama Tuha Peut *Gampong* Labuy

Adapun Nama-nama Perangkat *Gampong* Labuy seperti dalam Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Nama-nama Perangkat *Gampong* Labuy

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|-------------|-------------|
| 1 | Saifullah | Ketua |
| 2 | Abdul Karim | Wakil Ketua |
| 3 | Nasrol M | Anggota |
| 4 | Suriadi | Anggota |
| 5 | Hasanuddin | Anggota |
| 6 | Nur Asiah | Sekretaris |

Sumber : Buku Induk *Gampong* Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

3. Letak Geografis *Gampong* Labuy

Gampong Labuy merupakan *Gampong* yang strategis letaknya karena berada pada posisi jalan Raya Laksamana Malahayati, yang mana jalan ini adalah jalan lintas yang menghubungkan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 2 Meter
- b. Suhu udara rata-rata : Sedang
- c. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran rendah

Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan *Gampong*)

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 2,5 KM
- b. Jarak dari Pusat pemerintahan kota administratif : 11,5 KM
- c. Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota Banda Aceh : 63 KM
- d. Drainase/Talut : 5000 Meter
- e. Panjang Jalan *Gampong* : 9000 Meter
- f. Panjang Jalan Setapak : 3000 Meter

Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar terletak ditepian pantai dengan jarak 500-1000 Meter dari tepi pantai Selat Malaka. *Gampong Labuy* merupakan *Gampong* yang strategis karena dilintasi jalan Raya Laksamana Malahayati yang merupakan jalan Propinsi yang menghubungkan Kota Banda Aceh dan Pelabuhan Malahayati. Adapun Batas – Batas *Gampong Labuy* sebagai berikut :

- a. Timur : Perbukitan Lam Ujong dan Labuy
- b. Barat : Laut Selat Malaka
- c. Utara : *Gampong Lam Ujong*
- d. Selatan : *Gampong Lampineung*

Adapun luas *Gampong Labuy* lebih kurang 120 Ha, *Gampong Labuy* merupakan salah satu wilayah dibawah kemukiman Klieng.

4. Rekapitulasi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan *Gampong Labuy*

Tabel 4.3 Nama-nama anggota kelompok “*Lagee Mupakat*”

| No | Nama | Umur | Jabatan |
|----|---------------|----------|------------|
| 1 | Maisarah | 38 tahun | Ketua |
| 2 | Zaitun | 41 tahun | Sekretaris |
| 3 | Nazirah | 27 tahun | Bendahara |
| 4 | Darwilis | 32 tahun | Anggota |
| 5 | Sri Bahagiana | 44 tahun | Anggota |
| 6 | Ida Purwanti | 29 tahun | Anggota |
| 7 | Syamsidar | 40 tahun | Anggota |
| 8 | Armayani | 31 tahun | Anggota |

Sumber : Buku Induk *Gampong Labuy* Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Tabel 4.4 Nama-nama anggota kelompok “*Ta Mupakat*”

| No | Nama | Umur | Jabatan |
|----|-------------------|----------|------------|
| 1 | Maryana | 35 tahun | Ketua |
| 2 | Karyati | 38 tahun | Sekretaris |
| 3 | Rosdiana | 49 tahun | Bendahara |
| 4 | Ratna Juwita | 29 tahun | Anggota |
| 5 | Cut Ratna Maheran | 30 tahun | Anggota |
| 6 | Sarini | 41 tahun | Anggota |
| 7 | Rohani | 47 tahun | Anggota |
| 8 | Junaina | 33 tahun | Anggota |

Sumber : Buku Induk *Gampong Labuy* Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

5. Profil Kelompok *Lagee Mupakat*

Nama Kelompok : *Lagee Mupakat*

Alamat : *Gampong Labuy* Kecamatan Baitussalam - Aceh Besar

Tahun Berdiri : 2009

Bidang Usaha : Perdagangan

a. Susunan Pengurus

Ketua : Maisarah

Sekretaris : Zaitun

Bendahara : Nazirah

Anggota

1. Darwilis
2. Sri Bahagiana
3. Ida Purwanti
4. Syamsidar
5. Armayani

b. Identitas Anggota Kelompok *Lagee Mupakat*

Nama : Maisarah
Umur : 38 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : *Gampong Labuy*
Jenis Usaha : Dagang Bakso
Jumlah Pinjaman : 3.000.000.
Tujuan Pinjaman : Penambahan Modal Usaha

Nama : Zaitun
Umur : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : *Gampong Labuy*
Jenis Usaha : Jualan kue
Jumlah Pinjaman : 3.000.000.
Tujuan Pinjaman : Membuka Usaha Baru

Nama : Nazirah
Umur : 27 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : *Gampong Labuy*
Jenis Usaha : Jualan Kelontong
Jumlah Pinjaman : 3.000.000.
Tujuan Pinjaman : Penambahan Modal Usaha

Nama : Darwilis
Umur : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : *Gampong Labuy*
Jenis Usaha : Jualan Kelontong
Jumlah Pinjaman : 3.000.000.
Tujuan Pinjaman : Penambahan Modal Usaha

Nama : Sri Bahagiana
Umur : 44 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : *Gampong Labuy*
Jenis Usaha : Jualan Kelontong
Jumlah Pinjaman : 3.000.000.
Tujuan Pinjaman : Penambahan Modal Usaha

Nama : Ida Purwanti
Umur : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : *Gampong Labuy*
Jenis Usaha : Jualan Keliling
Jumlah pinjaman : 3.000.000.
Tujuan Pinjaman : Penambahan Modal Usaha

Nama : Syamsidar
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : *Gampong Labuy*
 Jenis Usaha : *Jualan Kelontong*
 Jumlah pinjaman : *2. 000. 000.*
 Tujuan Pinjaman : *Penambahan Modal Usaha*

Nama : *Armayani*
 Umur : *31 Tahun*
 Jenis Kelamin : *Perempuan*
 Alamat : *Gampong Labuy*
 Jenis Usaha : *Menjahit*
 Jumlah pinjaman : *3. 000. 000.*
 Tujuan Pinjaman : *Penambahan Modal Usaha¹*

6. Profil Kelompok *Ta Mupakat*

Nama Kelompok : *Ta Mupakat*
 Alamat : *Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam - Aceh Besar*
 Tahun Berdiri : *2011*
 Bidang Usaha : *Perdagangan*

a. Susunan Pengurus

Ketua : *Maryana*
 Sekretaris : *Karyati*
 Bendahara : *Rosdiana*

Anggota

¹ *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, Proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dana Perguliran kelompok Lagee Mupakat Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Tahun 2009.*

1. Ratna Juwita
2. Cut Ratna Maheran
3. Sarini
4. Rohani
5. Junaina

b. Identitas Anggota Kelompok *Ta Mupakat*

Nama : Maryana
 Umur : 35 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : *Gampong Labuy*
 Jenis Usaha : Jualan Kue
 Jumlah Pinjaman : 3.000.000.
 Tujuan Pinjaman : Penambahan Modal Usaha

Nama : Karyati
 Umur : 38 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : *Gampong Labuy*
 Jenis Usaha : Jualan Ayam Potong
 Jumlah Pinjaman : 3.000.000.
 Tujuan Pinjaman : Membuka Usaha Baru

Nama : Rosdiana
 Umur : 49 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : *Gampong Labuy*
 Jenis Usaha : Jualan Kelontong

Jumlah Pinjaman : 3. 000. 000.
Tujuan Pinjaman : Penambahan Modal Usaha

Nama : Ratna Juwita
Umur : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : *Gampong Labuy*

Jenis Usaha : Jualan Sembako
Jumlah Pinjaman : 3. 000. 000.
Tujuan Pinjaman : Penambahan Modal Usaha

Nama : Cut Ratna Maheran
Umur : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : *Gampong Labuy*
Jenis Usaha : Jualan Kelontong
Jumlah Pinjaman : 3. 000. 000.
Tujuan Pinjaman : Penambahan Modal Usaha

Nama : Sarini
Umur : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : *Gampong Labuy*
Jenis Usaha : Jualan Kelontong
Jumlah pinjaman : 3. 000. 000.
Tujuan Pinjaman : Penambahan Modal Usaha
Nama : Rohani

Umur : 47 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : *Gampong Labuy*
 Jenis Usaha : Jualan sayur
 Jumlah pinjaman : 2.000.000.
 Tujuan Pinjaman : Penambahan Modal Usaha

Nama : Junaina
 Umur : 33 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : *Gampong Labuy*
 Jenis Usaha : Menjahit
 Jumlah pinjaman : 3.000.000.
 Tujuan Pinjaman : Penambahan Modal Usaha²

7. Syarat meminjam Uang Simpan Pinjam Untuk Perempuan

Adapun yang menjadi syarat untuk mendapatkan uang simpan perempuan yaitu sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan kepada lembaga PNPM kecamatan .
- b. Membentuk kelompok usaha dengan membuat struktur kelompok.
- c. Membuat surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok.
- d. Membuat usulan Rencana Usaha Anggota (RUA).

² *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, Proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dana Perguliran kelompok Lagee Mupakat Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Tahun 2011.*

- e. Membuat Surat Pernyataan Peminjam.³

B. Sikap Positif Kelompok dalam Pengembalian Uang SPP

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap stimulus atau objek. Sikap positif adalah reaksi atau respon baik yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat, begitu juga sikap negatif adalah sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai maupun norma-norma dalam masyarakat.

Untuk memulai sebuah usaha, banyak orang sering merasa kebingungan karena tidak memiliki modal. Apalagi untuk masyarakat Indonesia yang tergolong miskin. Bagi mereka mencari modal usaha dipandang sebagai solusi terbaik seiring dengan dipermudahnya proses mendapatkan uang SPP tersebut. Terlebih lagi saat ini pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan ekonomi, dimana pembangunan ini merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya fasilitas uang SPP tersebut, akan memudahkan masyarakat untuk menjalankan bisnisnya. Namun pada prakteknya banyak pengusaha kecil yang mendapatkan uang SPP gagal memanfaatkan dana tersebut dan justru berujung sebagai kredit macet. Ketika mengambil kredit atau pinjaman dari PNPM-MP ini, akan ada rencana pembayaran yang ditetapkan di tempat dengan istilah lain cicilan pembayaran kredit sebagai pelunasan. Jika kelompok penerima kredit tersebut melewati pembayaran ini atau menunggak, dapat dikatakan

³ Hasil wawancara dengan ibu Nisa di Sekretariat PNPM Kecamatan Baitussalam pada Tanggal 26 November 2015

sebagai suatu pinjaman yang dapat berujung pada risiko gagal bayar. Istilah gagal bayar dikenal dan dipergunakan dalam dunia keuangan untuk menggambarkan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dibuatnya, misalnya tidak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang sesuai dengan kesepakatan termasuk melakukan pelanggaran atas persyaratan kredit sebagaimana diatur di dalam kontrak.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), maka diketahui sikap yang mengandung nilai positifnya. “Seperti ketepatan dan kemanfaatan uang SPP tersebut. Anggota kelompok SPP banyak yang menganggap uang tersebut sangat membantu dalam penambahan modal usahanya, serta membangun usaha baru seperti usaha kios, perternakan, dan menjahit semua itu bertujuan untuk melancarkan perekonomiannya. Di samping itu, kelompok tersebut juga mengakui bahwa uang SPP harus dikembalikan karena hal itu tertera dalam petunjuk dan teknis uang SPP itu”.⁴

Keuchik *Gampong Labuy* mengatakan bahwa: “Sebagian dari masyarakat atau kelompok yang mengambil uang SPP ini mengembalikan uang tersebut dengan tepat waktu, tetapi hanya sebagian masyarakat atau sebagian kelompok saja, sebagiannya lagi tidak melakukan penyetoran dengan baik bahkan ada yang

⁴ Hasil wawancara dengan Nazirah dan Sri Bahagiana (Anggota kelompok *Lagee Mupakat*) pada Tanggal 22 November 2015.

tidak mengembalikan uang SPP tersebut”.⁵ Masyarakat yang mengembalikan uang SPP tersebut dengan baik dan teratur adalah termasuk dalam sikap positif masyarakat terhadap pengembalian uang SPP, namun tidak semua masyarakat mau mengembalikan uang tersebut dengan menggunakan alasan-alasan tertentu.

“Adapun ketepatangunaan uang SPP tersebut memang kebanyakan sudah sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh pihak pengelola uang SPP”.⁶ Namun begitu ada juga pihak anggota kelompok yang belum menggunakan uang SPP itu untuk pemberdayaan ekonomi melainkan untuk membeli peralatan rumah tangga. “Masyarakat yang bersikap positif menganggap uang SPP tersebut merupakan program yang sangat bagus, karena jarang ada bantuan yang dapat diberikan langsung berupa uang tunai yang dapat dikelola sehingga berkembang, tapi sebagian masyarakat tidak sadar seakan-akan itu semua hanya pemberian mutlak, uang pemerintah untuk masyarakat”.⁷

“Kesadaran masyarakat dalam mengembalikan uang SPP memang sudah tertanam dalam diri mereka. Hal itu dapat diketahui dari anggapan masyarakat itu sendiri, bahwa uang SPP itu bukan diberikan secara cuma-cuma akan tetapi harus bayar secara angsuran sesuai dengan tempo yang telah ditentukan”.⁸ Disamping

⁵ Hasil wawancara dengan Iswandi Ishak, SE (Keuchik *Gampong Labuy* Kecamatan Baitussalam), pada Tanggal 21 November 2015.

⁶ Hasil wawancara dengan Hanafiah (Kaur Pembangunan *Gampong Labuy* Kecamatan Baitussalam), pada Tanggal 21 November 2015.

⁷ Hasil wawancara dengan Eri Alfian (Bendahara *Gampong Labuy* Kecamatan Baitussalam), pada Tanggal 22 November 2015.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ida Purwanti (Anggota kelompok *Lagee Mupakat*), pada Tanggal 23 November 2015.

itu “Sebenarnya anggota kelompok juga memiliki niat sepenuhnya untuk mengembalikan setoran uang SPP dengan baik, namun seiring berjalannya waktu yang dulunya uang SPP itu digunakan untuk modal usaha ternyata sia-sia karena usahanya macet sehingga masyarakat tidak mampu melunasi setoran bulannya, tapi walaupun demikian saya tetap mengembalikan uang SPP tersebut karena saya beranggapan bahwa uang yang saya pinjam dihitung sebagai hutang yang wajib untuk dilunasi”.⁹ Anggota kelompok lainnya juga mengatakan “Jika setiap anggota kelompok memiliki kesadaran untuk mengembalikan uang SPP ini dengan benar maka program ini akan sangat baik dan terus berkelanjutan”.¹⁰

Sikap positif bagi masyarakat secara umum terlihat jelas bahwa mereka banyak menggunakan dana tersebut untuk modal usaha, dan melakukan penyetoran uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan baik dan teratur, namun tidak kurang dari mereka yang gagal bahkan sama sekali tidak ada yang diuntungkan dari hasil uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dalam proses ini masyarakat yang bersikap positif cenderung mengembalikan uang setoran dengan teratur maka ketua kelompok tidak mengalami kesulitan dalam penagihan uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada anggota kelompok, selain usaha mereka yang berjalan dengan baik, banyak juga diantara mereka yang melunasi uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan tempo yang relatif cepat .

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Darwilis (Anggota kelompok *Lagee Mupakat*), pada Tanggal 22 November 2015.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rosdiana (Anggota kelompok *Ta Mupakat*), pada Tanggal 23 November 2015.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari kedua kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) *Gampong Labuy*. Ketua kelompok *Lagee Mupakat* mengatakan bahwa “jumlah kelompoknya yang bersikap positif terhadap pengembalian uang SPP ini tergolong sangat sedikit, hanya 5 orang dari 8 anggota kelompok yang melakukan pengembalian dengan teratur dan menjalankan usaha-usahanya, selebihnya mereka hanya mencari alasan agar uang SPP tersebut tidak dikembalikan lagi”.¹¹ Kemudian Ketua kelompok *Ta Mupakat* mengatakan bahwa “ia kecewa terhadap sikap anggota kelompoknya yang hanya 2 orang yang mau bersikap positif dari 8 anggota kelompok yang melakukan pengembalian dengan baik, selebihnya malah menghabiskan uang tersebut bukan dengan membuka usaha tetapi mereka membeli perabotan rumah tangga seperti Televisi, Kulkas, Kipas Angin, Meja makan, seta mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan hari-hari yaitu membeli sembako”.¹²

Hasil penelitian yang peneliti peroleh, masyarakat yang mengembalikan uang simpan pinjam perempuan (SPP) dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

¹¹ Hasil wawancara dengan Maisarah (Ketua kelompok *Lagee Mupakat*), pada Tanggal 21 November 2015.

¹² Hasil wawancara dengan Maryana (Ketua kelompok *Ta Mupakat*), pada Tanggal 22 November 2015.

Tabel 4.5 Nama-nama anggota kelompok pertama “*Lagee Mupakat*” yang mengembalikan uang SPP.

| No | Nama | Jabatan |
|----|---------------|-----------|
| 1 | Maisarah | Ketua |
| 2 | Nazirah | Bendahara |
| 3 | Darwilis | Anggota |
| 4 | Sri Bahagiana | Anggota |
| 5 | Ida Purwanti | Anggota |

Tabel 4.6 Nama-nama anggota kelompok kedua “*Ta Mupakat*” yang mengembalikan uang SPP.

| No | Nama | Jabatan |
|----|----------|-----------|
| 1 | Maryana | Ketua |
| 2 | Rosdiana | Bendahara |

Sikap positif masyarakat dalam pengembalian uang simpan pinjam perempuan (SPP) di *Gampong Labuy* Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar yaitu hanya 7 orang dari 16 orang yang terdiri dari dua kelompok tersebut.

C. Sikap Negatif Kelompok dalam Pengembalian Uang SPP

Dalam realita kehidupan masyarakat memang tidak selamanya menjalankan aktivitasnya dengan cara positif, akan tetapi pasti ada liku-liku kehidupan yang mendorong kearah yang negatif, namun semua itu memiliki alasan dan sebab yang jelas dalam mengambil sikap yang negatif tersebut.

Berangkat dari suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat tentang sikap negatif terhadap pengembalian uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Seiring dengan permasalahan tersebut, masyarakat mengetahui

bahwa uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan bentuk permodalan yang harus dibayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau dalam bahasa lain disebut dengan hutang. Adapun tujuan uang tersebut disalurkan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Beragam sikap negatif yang muncul dalam lingkungan kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) dalam mengambil sikapnya terhadap uang SPP tersebut. “Sebagian masyarakat yang menganggap bahwa uang itu dari pemerintah diberikan untuk masyarakat, jadi uang itu tidak perlu dikembalikan lagi (*peng jen joek keu jen*)”.¹³ Ibu ini tidak mengembalikan uang SPP tersebut karena beranggapan uang tersebut uang yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah dan dianggap sebagai uang bantuan untuk masyarakat miskin. Bukan ibu ini saja, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang tidak tepat dalam menggunakan uang SPP tersebut yaitu tidak dipergunakan untuk modal usahanya melainkan untuk keperluan lainnya seperti menggunakan untuk rehab sumur karena masyarakat menganggap uang tersebut hanya bernilai sedikit hanya 3 (tiga) juta rupiah saja, sehingga kurang cukup untuk dipergunakan sebagai modal usaha¹⁴. Dalam mengambil sikap terhadap pengembalian uang tersebut ada juga sebahagian anggota lain yang mengembalikan uang SPP namun tetap saja tidak akan tertular kepada anggota lain untuk ikut melunasi penyeteroran uang SPP

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Junaina (Anggota Kelompok *Ta Mupakat*), pada Tanggal 23 November 2015.

¹⁴ Hasil observasi (Di Rumah Ibu Junaina) , pada Tanggal 23 November 2015.

tersebut, karena sebagian anggota lainnya tetap tidak mau melakukan penyetoran dengan baik, dengan alasan uang tersebut sudah dihabiskan dengan membeli barang-barang rumah tangga serta tidak mendapatkan hasil dari uang SPP itu.¹⁵

Keragaman sikap negatif lainnya dimunculkan oleh kelompok tentang rasa kekecewaan yang dialami oleh ketua kelompok selaku penanggung jawab dalam kelompok kepada anggota lainnya. “Karena banyak anggota yang tidak melunasi setoran uang SPP tersebut, apalagi jika pihak lembaga PNPM Mandiri melakukan pemantauan ke lokasi *Gampong* Labuy sama sekali tidak sesuai dengan harapan mereka, karena tujuan dari program uang SPP ini ialah untuk membantu masyarakat yang ekonominya masih rendah. Masyarakat disini tidak menyadari bahwa bantuan tersebut sangatlah membantu mereka”.¹⁶

Kekecewaan yang dimunculkan oleh ketua kelompok terlihat wajar karena tingkah anggotanya yang tidak merespon tentang pembayaran uang SPP tersebut. Sedangkan penanggung jawab saat dilakukan survei oleh pihak PNPM maka ketua kelompoklah yang menjadi ujung tombak atas segala masalah tersebut. Meski demikian, anggota kelompok lainnya tetap saja tidak menghiraukan efek-efek tersebut, serta mereka tidak peduli atas hilangnya kepercayaan dari pihak penyelenggara uang SPP tersebut, sehingga berpengaruh pada masa yang akan datang untuk tidak di realisasikan lagi dananya pada tahap berikutnya.¹⁷

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sarini (Anggota Kelompok *Ta Mupakat*), pada Tanggal 25 November 2015.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Maisarah (Ketua Kelompok *Lagee Mupakat*), pada Tanggal 21 November 2015.

¹⁷ Hasil observasi pada Tanggal 23 November 2015.

Sebenarnya bukan hanya pihak penyelenggara dana SPP saja yang bisa terancam akan tetapi masyarakat juga dapat terancam karena diberhentikan program tersebut pada *Gampong Labuy*.

Kesadaran masyarakat akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja sebutkan dalam bahasa lain yaitu rasa tanggung jawab masyarakat terhadap uang SPP. Sedangkan faktanya rasa tanggung jawab masyarakat dikelabui oleh sikap negatifnya sehingga tidak berdampak sama sekali tentang rasa tanggung jawab. “Masyarakat masih menganggap uang itu tidak wajib untuk dibayar seperti saat ketua kelompok meminta tagihan kerumah, anggotanya mengatakan tidak ada uang lagi bagaimana mengembalikannya, uang tersebut telah dihabiskan untuk membeli peralatan rumah tangga seperti kulkas, Televisi, Kipas Angin, Dispenser dan lain-lain”.¹⁸ Dari ungkapan tersebut, menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab dan kesadarannya tidak dimiliki sama sekali tentang kewajiban mengembalikan uang SPP tersebut.

Disamping itu sikap negatif yang terjadi pada anggota kelompok uang SPP yaitu “Adanya anggapan ikut-ikutan. Anggapan tersebut sangat masyhur dari setiap anggota kelompok, istilahnya setiap anggota beranggapan bahwa uang SPP itu perlu di kembalikan, tetapi karena melihat anggota lainnya ada yang tidak mengembalikan uang SPP tersebut sama sekali, maka anggota yang lain juga ikut-

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Karyati, Ibu Ratna Juwita dan Ibu Cut Ratna Maheran pada Tanggal 27 November 2015.

ikutan”.¹⁹ Mereka yang tidak mengembalikan uang SPP tersebut tidak merasa takut, ketika observasi di lapangan peneliti terkadang memang tidak menemukan lahan usaha seperti kios atau sebagainya, dengan alasan uang yang diberikan hanya sedikit jadi tidak mungkin kita jadikan sebagai modal usaha.²⁰

Dari beberapa permasalahan yang terdapat di dalam lingkungan kelompok uang SPP dapat dipahami bahwa, masyarakat yang bersikap negatif cenderung bermasalah dalam pelaksanaan peminjaman uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh PNPM Mandiri pedesaan melalui Bantuan Keuangan Peumakmu *Gampong* (BKPG), banyak anggota kelompok yang tidak mengikuti aturan, seperti tidak mengembalikan uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP), menghabiskan uang tersebut dengan membeli alat-alat rumah tangga seperti Kulkas, Televisi, Kipas Angin, Dispenser dan lain-lain, mereka mempergunakan dana yang bersifat konsumtif serta pemakaian dana yang tidak menggunakan manajemen yang jelas, seperti buku catatan harian dan tabungan harian. Selain itu para anggota kelompok sudah menjadi suatu penyakit bahwa jika ada dana yang disalurkan oleh pemerintah mereka tidak memanfaatkannya dalam bidang usaha, akan tetapi bantuan seperti itu merupakan peluang bagi mereka untuk menghabiskan begitu saja tanpa ada perhitungan yang jelas.

Adapun masyarakat yang tidak mengembalikan uang simpan pinjam perempuan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Zaitun, Ibu Syamsidar, dan Ibu Armayani (Anggota *Lage Mupakat*), pada Tanggal 25 November 2015.

²⁰ Hasil observasi (di rumah anggota kelompok), pada Tanggal 25 November 2015.

Tabel 4.7 Nama-nama anggota kelompok pertama “*Lagee Mupakat*” yang tidak mengembalikan uang SPP.

| No | Nama | Jabatan |
|----|-----------|------------|
| 1 | Zaitun | Sekretaris |
| 2 | Syamsidar | Anggota |
| 3 | Armayani | Anggota |

Tabel 4.8 Nama-nama anggota kelompok yang kedua “*Ta Mupakat*” yang tidak mengembalikan uang SPP.

| No | Nama | Jabatan |
|----|-------------------|---------|
| 1 | Karyati | Anggota |
| 2 | Ratna Juwita | Anggota |
| 3 | Cut Ratna Maheran | Anggota |
| 4 | Sarini | Anggota |
| 5 | Rohani | Anggota |
| 6 | Junaina | Anggota |

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, masyarakat yang bersikap negatif lebih banyak yaitu 9 orang yang tidak mengembalikan uang simpan pinjam perempuan dari 16 orang yang terdiri dari dua kelompok.

D. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala Bagi Kelompok Terhadap Pengembalian Uang SPP

Faktor yang mempengaruhi yaitu tingkat kesadaran anggota kelompok SPP di *Gampong Labuy* masih kurang terhadap program pengembangan ekonomi masyarakat miskin. Karena sebagian masyarakat beranggapan uang SPP tersebut hanya semata-mata untuk membantu dan menunjang kebutuhan keluarga yang kurang mampu. Adapun faktor lain yang mendasar yaitu kurangnya pengontrolan dari lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Perdesaan terhadap perealisasi anggaran, sehingga muncul berbagai masalah. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang disebabkan oleh individu atau kelompok itu sendiri dan faktor eksternal yang disebabkan oleh pihak donatur.

“Banyak faktor-faktor yang menjadi kendala bagi masyarakat *Gampong Labuy* dalam memanfaatkan uang Simpan Pinjam Perempuan, hal ini dapat diungkapkan beberapa fakta yang terjadi dikalangan kelompok SPP ketika dilapangan diantaranya yaitu :

1. Hilangnya rasa tanggung jawab

Sikap tanggung jawab adalah sikap yang mempunyai komitmen untuk tidak meninggalkan sesuatu ditengah jalan dan tidak melepas sesuatu yang merupakan kewajibannya. Rasa tanggung jawab timbul dari kesadaran diri sendiri, bahwa dia mempunyai sesuatu yang tidak dapat ditelantarkan begitu saja. Banyak sekali kegiatan kelompok simpan pinjam perempuan yang menyangkut sikap tanggung jawab ini seperti tanggung jawab dalam pengembalian uang SPP.

Fakta yang terjadi dalam kelompok SPP, ketika ketua kelompok menemui anggota kelompok untuk menagih uang setorannya, tetapi anggota kelompoknya tidak merespon bahkan menunjukkan sifat-sifat marah dengan suara keras mengatakan itu hanya uang pemerintah, jadi untuk apa dikembalikan lagi. Ini merupakan sikap yang menunjukkan rasa tidak tanggung jawab atas

penyetorannya, sehingga terjadinya kemacetan dalam pengembalian uang SPP tersebut.”²¹

Dalam hal di atas, terlihat bahwa masyarakat tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam penggunaan dan pengembalian uang simpan pinjam tersebut. Masyarakat bersikap seakan-akan pengembalian uang tersebut bukanlah suatu tanggung jawab yang harus ditepati serta dijunjung tinggi, peneliti melihat sebagian masyarakat menghabiskan uang SPP tersebut dengan membelikan perabotan rumah tangga seperti kulkas, TV, kompor gas dan lain-lain.²²

2. Macet usaha

Kendala-kendala dalam menjalankan Program Uang Simpan Pinjam Perempuan oleh anggota kelompoknya menganggap uang untuk usaha cukup, tetapi mengaku usahanya tidak berjalan dengan lancar, bahkan ada “Sebagian anggota kelompok pernah mengembalikan ansurannya selama dua bulan pertama kepada ketua kelompok, dan untuk seterusnya mereka tidak sanggup menyetor lagi. Karena uang yang diberikan masih menganggap kurang untuk buka usahanya, sehingga tidak mendapatkan keuntungan yang sesuai menurutnya.”²³

Dengan berbagai faktor dan alasan tentang macetnya suatu usaha, memang menjadi hal yang biasa, karena dalam dunia bisnis tidak pernah lepas dengan yang namanya laba dan rugi. “Namun macet usaha tersebut bukanlah

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Maryana (Ketua Kelompok *Ta Mupakat*), pada Tanggal 21 November 2015.

²² Hasil observasi (Kelompok Uang SPP Gampong *Labuy*), pada Tanggal 21 November 2015.

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Cut Ratna Maheran (Anggota Kelompok *Ta Mupakat*), Pada Tanggal 22 November 2015.

suatu alasan untuk tidak mengembalikan uang SPP tersebut. Maka, dari demikian kejadian, terlihat jelas bahwa, masyarakat memang kurang berniat untuk mengembalikan uang SPP itu, dan kebetulan saja memiliki alasan yang tepat yaitu macet usaha, sehingga mengambil kesempatan untuk tidak mengembalikannya.”²⁴

3. Menyalahgunakan Uang SPP

Pada dasarnya program SPP adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih mandiri. Peningkatan taraf hidup tersebut dapat ditingkatkan melalui usaha, meningkatkan peluang lapangan pekerjaan yakni perempuan yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, kini memiliki bermacam ragam pekerjaan pokok mulai berdagang dengan harapan mereka mampu untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Serta memiliki mata pencaharian pada waktu luang dapat membuka usaha dagang kecil-kecilan. Harapan lainnya setelah mengikuti program simpan pinjam perempuan ini akan memiliki penghasilan yang sisanya dapat ditabung, selain itu dapat mengembangkan usaha. Begitu juga perkembangan usaha bagi yang sudah mempunyai usaha juga agar mengalami peningkatan karena telah memiliki modal tambahan. Disamping itu kelompok perempuan dapat terbebas dari jeratan bank keliling dan tercapainya kebutuhan dasar sosial seperti pendidikan, kesehatan dan peningkatan standar hidup menjadi lebih baik serta peningkatan lapangan pekerjaan.

Harapan demi harapan, pastinya tidak sesuai dengan realita dilapangan, serta tidak menjalankan sesuai dengan aturan penggunaan uang SPP yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan oleh anggota kelompok uang SPP, mereka mengakui

²⁴ Hasil wawancara dengan Hanafiah (Ketua Pemuda *Gampong Labuy*), pada Tanggal 21 November 2015.

bahwa “Uang tersebut tidak dipergunakan untuk membuka usaha karena disaat uang SPP itu keluar, mereka membutuhkan uang untuk keperluan rumah dan juga untuk kebutuhan anak-anak yang masih sekolah”.²⁵

Penyalahgunaan uang SPP yang dilakukan oleh kelompok perempuan, dapat mengakibatkan kegagalan pada masyarakat serta pada pihak penyaluran uang SPP tersebut. Menurut amatan peneliti, “Masyarakat hanya menjual nama usaha saja untuk mendapatkan uang SPP, sedangkan implementasinya masih terlihat tidak tepat dalam penggunaannya. Karena uang SPP itu dipergunakan sebagai modal usaha, akan tetapi realitanya masyarakat mempergunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti membeli alat rumah tangga, dan untuk kebutuhan sehari-hari. Demikian halnya yang terjadi dikalangan masyarakat kelompok SPP *Gampong Labuy*, jadi uang SPP tersebut tidaklah berbuah hasil disebabkan oleh kesalahangunaan uang tersebut, sehingga tidak mampu menyetor uang setoran perbulannya”.²⁶

4. Kurangnya pengawasan dari lembaga PNPM Mandiri

Faktor yang mempengaruhi kinerja program SPP yaitu adanya persepsi dari pemanfaatan dana SPP, dalam hal itu pentingnya program untuk dianjurkan, saran terhadap program dan persepsi para pelaku kegiatan. Faktor yang mempengaruhi kinerja SPP yaitu motivasi anggota dalam bergabung dengan SPP serta faktor pendamping sangat mempengaruhi dalam berkembangnya usaha

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Rohani (Anggota Kelompok *Ta Mupakat*), pada Tanggal 24 November 2015.

²⁶ Hasil Observasi di lokasi (Kelompok Simpan Pinjam Perempuan), pada Tanggal 24 November 2015.

mereka. Faktor lain yang mempengaruhi kinerja SPP adalah koordinasi antar pengelola kegiatan dan penerima dana, pemanfaatan dana masih sering digunakan konsumtif serta kurangnya pendampingan untuk mengembangkan dan mengawasi usaha mereka. Tim pendamping merupakan faktor eksternal dalam pemberdayaan masyarakat, peran tim pada pengelola uang SPP tersebut sangat dibutuhkan tetapi kenyataannya, pihak tim kurang memerhatikan secara konsisten sehingga masyarakat kurang terberdaya dalam melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Dalam Panduan Operasional PNPM Mandiri menjelaskan fungsi dari pendamping:

- a. Fasilitator yaitu berperan dalam memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Panduan operasional PNPM Mandiri menjelaskan bahwa menjadi seorang fasilitator/ pendamping perlu dibekali beberapa kemampuan diantaranya, kepemimpinan, konseptual, komunikasi, menjadi pendengar yang aktif, bertanya efektif dan terarah, kemampuan dalam pengembangan masyarakat.
- b. Motivator didefinisikan sebagai seseorang (perangsang) yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu; pendorong; penggerak yang mampu menggerakkan masyarakat dan petugas yang ditunjuk untuk memberikan penerangan. Pendamping program berperan untuk mempersuasi masyarakat dengan cara memotivasi untuk ikut terlibat dalam program.

Ketegasan pihak PNPM sangat berpengaruh terhadap semangat usaha masyarakat dalam memberdayakan kehidupannya dibidang ekonomi, agar masyarakat lebih mandiri, serta memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Hal ini, masyarakat menganggap bahwa uang SPP itu tidak begitu ketat dalam pengawasannya, sehingga masyarakat bersikap tidak memiliki tanggung jawab, kerna dianggap tidak ada pihak yang menuntut uang tersebut di kemudian waktu.

5. Kurangnya pembekalan terhadap anggota kelompok SPP

Keberhasilan suatu usaha bukan hanya tergantung dari permodalan secara riil yaitu berbentuk uang, namun ada hal penting lain yang juga berpengaruh yaitu kemampuan masyarakat dalam mengembangkan ekonominya serta cara meningkatkan taraf usahanya kearah yang lebih baik.

Berkaitan dengan penggunaan uang SPP di *Gampong Labuy*, masyarakat mengakui tentang lemahnya pengetahuan dibidang wirausaha. Sehingga uang yang didapatkan dari progam SPP tersebut, tidak tau cara menggunakan dibidang usahanya. Hal ini dapat menimbulkan penyalahgunaan dana tersebut, kebingunan dalam mengelola uang SPP maka masyarakat menggunakan uang itu untuk kebutuhan rumah tangga, bukan lagi digunakan untuk membuka usahanya.²⁷

Namun demikian, “Masyarakat tidak selamanya juga menyalahgunakan dana tersebut. Ada juga masyarakat yang mencoba menciptakan usahanya, tetapi seiring berjalannya waktu, usaha yang dibangun tersebut berhenti di tengah jalan,

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Saifullah (Ketua *Tuha Peut Gampong Labuy*) pada Tanggal 24 November 2015.

hal demikian bisa terjadi karena pengetahuan di bidang dagang atau usaha tidak memadainya”.²⁸

E. Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok SPP

Pemberdayaan menurut PNPM mandiri perdesaan adalah untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam berbagai pemecahan persoalan terkait upaya meningkatkan kualitas hidup, memandirikan dan kesejahteraan. Memberdayakan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

PNPM memiliki tujuan pokok yaitu untuk memberdayakan masyarakat khususnya kelompok uang simpan pinjam perempuan gampong labuy, Program uang SPP bertekad untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan, usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan sosial pendanaan sosial dasar, memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan, serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Serta mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan kaum rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam kaum perempuan.

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Maryana (Ketua Kelompok *Ta Mupakat*), pada Tanggal 21 November 2015.

Keberdayaan dalam proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan. Hal ini bisa dipahami bahwa dana yang telah disalurkan kepada kelompok SPP maka menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok yang meminjam uang untuk mengelola dana tersebut berdasarkan prakarsa sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi setiap peminjam sehingga dari dana yang dipinjam tersebut bisa untuk mengembangkan usaha yang telah ada.

Namun hal ini belum sejalan dengan harapan, dimana adanya kelompok yang belum mampu mengembangkan dana bergulir tersebut karena berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan tentang berwirausaha dan kurangnya rasa tanggung jawab, serta tidak menggunakan uang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Langkah yang ditempuh untuk meningkatkan keberdayaan pelaku simpan pinjam kelompok perempuan dalam pengelolaan dana bergulir tentu tidak bisa jika hanya dilakukan tanpa kerjasama antar pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan hal ini bisa menyebabkan tidak optimalnya hasil yang didapat, untuk itu bantuan dari pelaku lainnya terhadap keberdayaan pengelolaan yang didasari oleh masyarakat harus diimbangi dengan tenaga pendamping dari pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Disamping itu untuk pengembangan usaha-usaha yang ada di *Gampong Labuy* belum terlihat sukses atau berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya peningkatan pendapatan dikarenakan masyarakat tidak menggunakan dana sesuai dengan yang diharapkan, serta tidak

memiliki keseriusan dalam menjalankan usahanya, dan masyarakat masih menganggap uang SPP sebagai uang cuma-cuma dari pemerintah. Sedangkan keluhan lainnya yang dialami oleh masyarakat yaitu: pihak pengawasan yang terlibat dalam proses pelaksanaan belum maksimal dalam memberikan pelatihan maupun bimbingan yang berkaitan dengan permodalan dan jenis usaha. Karena itu masyarakat tidak tahu tentang jenis usaha yang akan mereka jalankan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Sikap masyarakat terhadap pengembalian uang simpan pinjam perempuan memiliki beberapa keragaman yang dapat mempengaruhi kelancaran pengembalian setorannya. Disamping itu, dalam pengelolaan dan pengembalian uang tersebut terdapat sikap-sikap yang positif, dan negatif, serta memiliki kendala-kendala dalam menjalankan proses pengembalian uang SPP tersebut.

Sikap positif masyarakat Gampong Labuy terhadap pengembalian uang SPP terlihat baik. Hal tersebut didasari oleh beberapa sikap yang peneliti temukan di lapangan seperti masyarakat menyadari bahwa uang SPP itu perlu untuk dikembalikan, masyarakat menggunakan uang SPP untuk membuka usaha baru serta penambahan modal usahanya, di samping itu masyarakat juga beranggapan bahwa program uang SPP itu sangat membantu dalam hal permodalan dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

Adapun sikap negatif yaitu masyarakat masih menganggap bahwa uang tersebut hanya bantuan dari pemerintah yang tidak perlu dikembalikan lagi kepada PNPM. Dalam hal penggunaan uang SPP, masyarakat menggunakan uang tersebut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk permodalan. Uang yang diterima oleh masyarakat masih menganggap tidak cukup untuk modal usahanya. Selain itu, sikap ikut-ikutan masih sangat kental dalam lingkungan masyarakat

kelompok uang SPP untuk tidak mengembalikan setorannya. Selanjutnya, masyarakat menganggap uang SPP tersebut hanya uang Cuma-Cuma dari pemerintah yang tidak perlu dibayar, sehingga dengan sikap tersebut terlihat bahwa masyarakat tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam menggunakan dan menyetor uang tersebut. Selain itu masyarakat tidak mengikuti aturan yang berlaku serta penggunaan dana tidak tepat sasaran dan uang itu tidak dikembalikan lagi, hingga akhirnya program SPP di Gampong Labuy terhenti sampai sekarang.

Adapun yang menjadi kendala diantaranya: usaha tidak berjalan, penggunaan dana yang tidak produktif, tidak ada manajemen keuangan yang jelas, dan kurangnya hilangnya rasa tanggung jawab. Selain itu, kurangnya monitoring program SPP dari pihak lembaga PNPM serta kurangnya pembekalan sebelum menyalurkan dana kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada semua pihak atau instansi terkait sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat Gampong Labuy dapat mengembalikan uang SPP tersebut dengan tepat waktu.
2. Seharusnya masyarakat menjalin kerjasama yang baik dan berkesinambungan dengan pihak donatur agar program tersebut dapat berjalan terus menerus.
3. Masyarakat harus memiliki manajemen yang baik dalam pengelolaan uang SPP, dan dapat memfungsikannya sesuai dengan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairuman Pasaribu Surahwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. Ke 1. Jakarta: Sinar Grafik, 1996.
- Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI, *Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu*, Direktur Bina Gizi Masyarakat Depkes dan Kesos. Jakarta, 2001
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Petunjuk Teknik Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*. Jakarta, 2009.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. Ke 3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Reflika Aditama, 2010.
- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES, 2001.
- Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial, Suatu Pengantar*, Cet. Ke 2. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Harsono, *Kemiskinan; Paradigma Berat di Dunia Timur*. Surabaya: Akademika II, November, 2003.
- Hamzah Ya'cob, *Etika Suami*. Bandung: Dipenogoro, 2002.
- Midgley, James "Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial". Jakarta: Diperta Islam Depag, 2005.
- Kahar Masyhur, *Membina Nilai-Nilai Moral dan Akhlak*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Kholili, *Komunikasi Untuk Dakwah*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

- Madikanto, *Pembangunan Pedesaan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty dan P3PK UGM 1998.
- Pranarka A. M. W, dan Projono, O. S, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, 1996.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian daalm Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Riza Lisyanti dan Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat..* Bandung: Algaprint, 2006.
- Buku Induk Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
- Sabil Subhi Ath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*. Bandung: Mizan, 2004.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, Cet II. (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hal. 103.
- Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia dan Pengukurannya*, Cet. Ke 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, Cet II. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Siti Partini Suardiman, *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Studing, t.t.
- Sumayardi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama, 2008.
- Sumodiningrat Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Sunartiningsih, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke 3. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Tanasale SA, *Evaluasi Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) dalam PNPM- Mandiri Perdesaan*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke3. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri* Jakarta: Direktorat Jendral Cita Karya, 2008.

PERTANYAAN WAWANCARA

Nama :

Usia :

Jabatan :

- A. Apakah masyarakat bersikap positif dalam pengembalian uang SPP di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
- B. Apakah masyarakat bersikap negatif dalam pengembalian uang SPP di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
- C. Kendala bagi masyarakat dalam pengembalian uang SPP di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

Bagaimana pendapat ibu tentang program SPP di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

- 1. Apakah ibu pernah meminjam uang SPP?
- 2. Berapa lama uang SPP itu diberikan (batas waktu) oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri perdesaan) melalui Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG)?
- 3. Apakah uang SPP itu diberikan secara Cuma-Cuma atau harus di kembalikan?
- 4. Kapan uang SPP itu dikembalikan, apakah perhari, perminggu, atau perbulan?
- 5. Apakah ibu ada mengembalikan uang SPP?
- 6. Kemana ibu pergunkan uang SPP setelah ibu terima?

7. Apa mamfaat yang ibu terima dari uang SPP tersebut?
8. Apakah ibu tau tentang uang SPP?
9. Apakah perlu uang SPP itu di kembalikan?
10. Bagaimana pendapat ibu jika uang SPP tersebut tidak dikembalikan?
11. Kenapa uang SPP harus dikembalikan?
12. Bagaimana sikap/ respon ibu jika ada orang setelah meminjam uang SPP, tetapi tidak mengembalikan?
13. Apakah ibu merasa marah atau tidak jika ada orang yang tidak mengembalikan uang SPP?
14. Apa yang akan ibu lakukan jika ada orang yang tidak mengembalikan uang SPP tersebut?
15. Upaya apa saja yang ibu lakukan untuk mengembalikan uang SPP?
16. Bagaimana pendapat ibu tentang pengembalian uang SPP di Gampong Labuy?
17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi ibu dalam mengembalikan uang SPP?

Dokumentasi Sidang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Afrizal
2. Tempat / Tgl. Lahir : Krueng Ceh/ 04 April 1988
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 441006150
6. Kebangsaan : Indonesia
 - a. Alamat : Gampong Kreung Ceh
 - b. Kecamatan : Seunagan
 - c. Kabupaten : Nagan Raya
7. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/ Hp : 0852 7751 5212

B. Riwayat Pendidikan

9. SD Negeri Sapek : 1996 - 2002
10. MTs Negeri Jeuram : 2002 - 2005
11. MA Negeri Jeuram : 2005 - 2008
12. UIN Ar-Raniry Banda Aceh : 2010 - Sekarang

C. Orang Tua/Wali

13. Nama Ayah : Razali
14. Nama Ibu : Rohani
15. Pekerjaan Orang Tua : Tani
16. Alamat Orang Tua : Nagan Raya

Banda Aceh, 16 Januari 2016
Peneliti,

(Afrizal)